



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUTI KURNIYANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
3. NHK : 764810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.660.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/54 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
2. Tanah Seluas 131 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. Bangunan Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000
4. Tanah Seluas 1.975 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 363.000.000
5. Tanah Seluas 1.051 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
6. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 321.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **129.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



16.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 848.300.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.360.614.157

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.998.414.157

III. HUTANG

Rp. 16.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.981.814.157

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.